

SKRIPSI

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) DI DESA BONTO SALLUANG KABUPATEN BANTAENG



Disusun oleh:

RIFALDI TRI AKBAR

105641104718

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) DI DESA BONTO SALLUANG KABUPATEN BANTAENG

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Ilmu Pemerintahan (S.IP)

Disusun dan diusulkan oleh :

RIFALDI TRI AKBAR

105641104718

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng

Nama Mahasiswa : Rifaldi Tri Akbar

Nomor Induk Mahasiswa : 105641104718

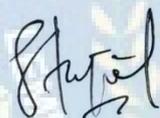
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

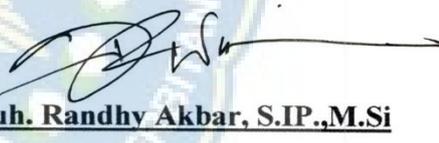
Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Hamrun, S.IP.,M.Si



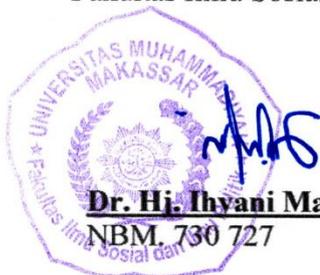
Muh. Randhy Akbar, S.IP.,M.Si

Mengetahui

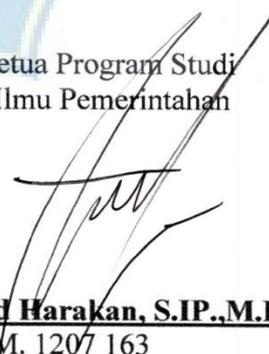
Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



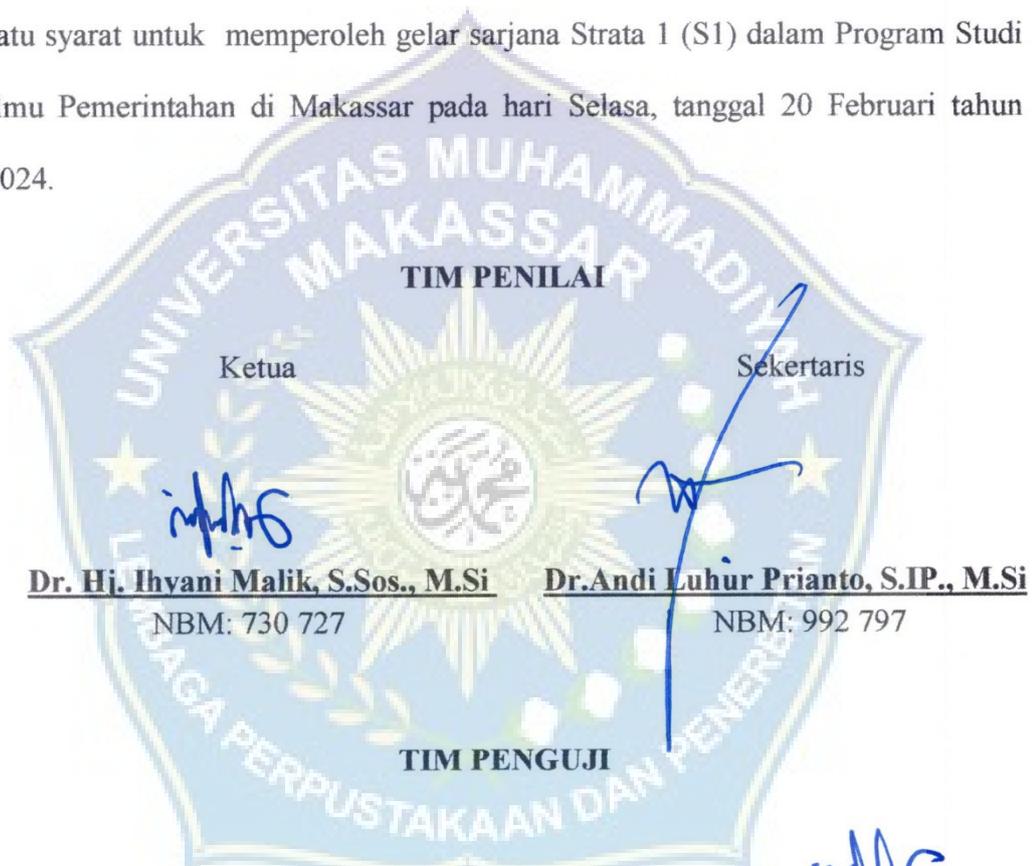
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si
NBM. 730 727



Ahmad Harakan, S.IP.,M.H.I
NBM. 1207 163

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan /undangan menguji ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0234/FSP/A.4-II/II/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Selasa, tanggal 20 Februari tahun 2024.



Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM: 730 727

NBM: 992 797

1. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si (Ketua)

()

2. Ahmad Harakan, S.IP., M.Si

()

3. Muhammad Randhy Akbar, S. IP., M.Si

()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rifaldi Tri Akbar

Nomor Stambuk : 105641104718

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 11 Februari 2024

Yang Menyatakan,

Rifaldi Tri Akbar

ABSTRAK

RIFALDI TRI AKBAR.2024. Evaluasi Pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng (dibimbing oleh Hamrun dan Muhammad Randhy Akbar)

Penelitian ini bertujuan mengetahui evaluasi pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam upaya menghapus/menanggulangi kemiskinan di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menganalisis jawaban dari informan yang berjumlah 5 orang yang diwawancarai kemudian menarik kesimpulan akhir dari hasil wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang ini yang tujuannya untuk pembangunan berkelanjutan mampu membantu masyarakat dari segi perekonomian. Program program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng sudah memenuhi indikator tersebut. Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang sudah mencapai efektivitas dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Program SDGs seperti bantuan modal secara garis besar memuaskan dan yang menerima program tersebut sangat terbantu dengan adanya program SDGs karena program ini sangat membantu perekonomian masyarakat Desa Bonto Salluang. Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang telah dilaksanakan sesuai sasaran dan ketentuan dalam SDGs utamanya pada aspek pembangunan, ekonomi dan kesehatan, sehingga program SDGs ini tepat dalam melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat desa.

Kata Kunci : Evaluasi, *Sustainable Development Goals* (SDGs).

ABSTRACT

RIFALDI TRI AKBAR.2024. *Evaluation of the Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) Program in Bonto Salluang Village, Bantaeng Regency (supervised by Hamrun and Muhammad Randhy Akbar)*

This research aims to determine the evaluation of the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) program in an effort to eliminate/overcome poverty in Bonto Salluang Village, Bantaeng Regency.

This type of research is qualitative by analyzing the answers from the 5 informants who were interviewed and then drawing final conclusions from the interview results. The data sources used are primary data and secondary data. The analytical method used is data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The research results show that the Sustainable Development Goals (SDGs) program in Bonto Salluang Village, whose aim is sustainable development, is able to help the community from an economic perspective. The Sustainable Development Goals (SDGs) program in Bonto Salluang Village, Bantaeng Regency has met these indicators. The Sustainable Development Goals (SDGs) program in Bonto Salluang Village has achieved effectiveness in achieving the expected goals. The SDGs program, such as capital assistance, is generally satisfactory and those who receive this program are greatly helped by the SDGs program because this program really helps the economy of the people of Bonto Salluang Village. The Sustainable Development Goals (SDGs) program in Bonto Salluang Village has been implemented in accordance with the targets and provisions in the SDGs, especially in the development, economic and health aspects, so that this SDGs program is appropriate for implementing Sustainable Development at the village level.

Keywords: *Evaluation, Sustainable Development Goals (SDGs).*

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan taufik-Nya jualah sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng” dapat diselesaikan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga terkhusus kepada dosen pembimbing Bapak Hamrun, S.IP.,M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Muh. Randhy Akbar, S.IP.,M.Si sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Semoga Allah SWT menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada :

1. Orang tua tercinta yang senantiasa medoakan dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof.Dr.H.Ambo Asse, M.Ag selakurektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membina Universitas ini dengan sebaik-baiknya.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
4. Ibu Dr.Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membina jurusan ini dengan sebaik-baiknya.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah member bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan dilembaga ini.
6. Segenap staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis.
7. Segenap rekan-rekan civitas akademika Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Seluruh teman-teman yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Makassar, 11 Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Teori dan Konsep.....	13
C. Kerangka Pikir	27
D. Fokus Penelitian.....	29
E. Deskriptif Fokus Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
B. Jenis Penelitian	32
C. Jenis dan Sumber Data.....	33
D. Informan Penelitian.....	33

E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data	35
G. Pengabsahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Hasil Penelitian	45
C. Pembahasan	65
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Informan Penelitian.....	26
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Bonto Salluang	40
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Desa Bonto Salluang	41
Tabel 4.3 Mata Pencarian Desa Bonto Salluang	41
Tabel 4.4 Daftar Penerima Program Bantuan di Desa Bonto Salluang	44
Tabel 4.5 Evaluasi berdasarkan indikator menurut Dunn	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	30
---------------------------------------	----



DAFTAR SINGKATAN



AKB	: Angka Kematian Bayi
AKI	: Angka Kematian Ibu
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
BPS	: Badan Pusat Statistik
GRK	: Gas Rumah Kaca
CSO	: <i>Civil Society Organization</i>
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PKH	: Program Keluarga Harapan
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UNDP	: United Nations Development Programme

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa sekarang dikenal sebagai era pengembangan dan pembangunan sehingga diharuskan setiap individu bisa mengadaptasikan diri. Selain itu, pada era saat ini gagasan seseorang bisa menjadi pengaruh besar untuk perkembangan pengetahuan dunia. Terjadi perkembangan yang kemudian menjadi teori serta visi untuk dijadikan landasan bagi seluruh dunia. Berbagai bentuk pendekatan dalam pengembangan pengetahuan juga dibahas sebagai gagasan agar tercapai serta terwujud pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat secara menyeluruh.

Indonesia telah meratifikasi program *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui kebijakan RPJMN 2020-2024 yang selaras dengan 17 tujuan SDGs. Dengan demikian, program *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama yang terkait dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, memperoleh pijakan yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia sekarang ini. Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) sendiri diluncurkan sebagai pengganti dari program *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir tahun 2015 (Raharjo, 2013). Tujuannya adalah sebagai program prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, sehingga dana desa tahun 2021 dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menggali potensi-potensi dan mengurangi angka kemiskinan di desa. Adapun latar belakang kehadiran SDGs desa adalah: (1) dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan

terbawah; dan (2) dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan melalui pembangunan desa yang lebih terfokus.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah program pembangunan berskala dunia yang sifatnya universal, tanpa mendikotomikan antara negara berkembang dan negara maju. Hal ini sebagai wujud dari kepedulian bersama untuk membangun visi global bahwa pembangunan yang berkelanjutan adalah kewajiban bagi seluruh negara di dunia. Mengingat bahwa sebelumnya telah terbentuk program pembangunan dengan tujuan serupa SDGs, meskipun cakupan yang dimilikinya tidak seluas dan seambisius SDGs, yaitu *Millennium Development Goals* (MDGs). Namun, MDGs dalam pelaksanaannya tidak bersifat terbuka, yang mana hanya menjadikan negara-negara berkembang sebagai objek dari pembangunan. Implikasi dari objektivikasi negara berkembang dalam pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs) adalah bahwa negara-negara berkembang hanya menjadi ajang program pembangunan yang diselenggarakan oleh negara-negara adidaya (Woodbridge, 2015).

Sustainable Development Goals (SDGs) terlahir sebagai respon dari rasa kepedulian bersama untuk mewujudkan sebuah planet yang adil, aman dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia untuk memperjuangkan kehidupan di bumi, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merefleksikan prinsip moral bahwa tidak ada satupun negarayang boleh berada dalam keadaan tertinggal, sementara negara lain mengalami kesejahteraan; setiap individu dan negara bertanggungjawab untuk

memainkan peran mereka dalam menyampaikan visi global mengenai SDGs (Osborn, Cutter, & Ullah, 2015).

Sustainable Development Goals (SDGs) secara eksplisit mempunyai tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan rasa aman dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. SDGs mampu menekan angka kemiskinan dan langkah kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim (Santosa, D, 2019).

Dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa, terdapat delapan tipe desa yang berfungsi sebagai arah pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Adapun kedelapan tipe desa adalah sebagai berikut (Siswanto 2021): (1) Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan; (2) Desa Ekonomi Tumbuh Merata; (3) Desa Peduli Kesehatan; (4) Desa Peduli Lingkungan; (5) Desa Peduli Pendidikan; (6) Desa Ramah Perempuan; (7) Desa Berjejaring; dan (8) Desa Tanggap Budaya.

Sebagai bentuk dari komitmen dunia, TBS/SDGs dijalankan agar tercapai kesejahteraan rakyat dengan beberapa target diantaranya pengentasan kemiskinan, mencapai kesejahteraan hidup, kesehatan yang terjamin, pendidikan bermutu, air bersih yang terpenuhi, lapangan kerja yang luas, peningkatan perekonomian serta inovasi dan fasilitas, penataan kota dan desa yang asri, penjagaan ekosistem laut maupun darat, dan sebagainya.

Target pelaksanaan pembangunan yang kontinue adalah hasil persetujuan negara anggota PBB dengan diwakili oleh pemimpin mereka, begitu juga dengan Indonesia. Hal tersebut menunjukkan terdapat korelasi terhadap pembangunan

yang Indonesia lakukan, sehingga berbagai persoalan dunia tengah terjadi juga di wilayah Indonesia sebagai bagian dari dunia.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden tersebut menjadi komitmen Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan/SDGs untuk melaksanakan dan turut serta dalam mencapai pembangunan global yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dengan keluarnya Peraturan Presiden mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, secara otomatis seluruh provinsi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib untuk mengeksekusi Peraturan Presiden Nomor 59 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan agar kesenjangan yang terjadi antara setiap provinsi, perkotaan dan pedesaan bisa diminimalisir sebaik mungkin dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) mempunyai 17 tujuan yang tergambar dalam 169 target-sasaran dan 241 indikator yang saling berkaitan. Untuk mensukseskan dan menjadikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai program yang mampu memberikan kesejahteraan secara universal, *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki 3 pilar dalam pelaksanaannya, yaitu 1) pilar sosial, pembangunan manusia dalam ruang lingkup sosial; 2) pilar ekonomi, pembangunan ekonomi; dan 3) pilar lingkungan, termasuk keanekaragaman hayati (Murniningtyas & Alisjhabana, 2018).

Pembangunan berkelanjutan bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia di seluruh dunia terkhusus bagi negara yang berkembang. Baik dari sekarang atau pada generasi yang akan datang tanpa dengan mengeksploitasi kapasitas sumberdaya alam yang ada di dunia (Jusuf, G., 2017).

Pembangunan berkelanjutan telah disepakati tanpa adanya penghapusan dari suatu hak pemenuhan kebutuhan di masa depan. Dalam pembangunan berkelanjutan terdapat suatu inti yang dimana berisi suatu Kebutuhan yang dimaksudkan ialah kebutuhan esensial (kebutuhan keberlanjutan) dan suatu keterbatasan yang mengacu kearah sumber daya (alam, manusia, teknologi, maupun organisasi). Sehingga, Pembangunan berkelanjutan dinilai sebagai konsep yang kompleks, karena penerapannya saling berkaitan dan banyak hal yang perlu untuk diperhatikan (Ramadhani, 2016). Arti kata kompleks pada pemaknaan ini merupakan pemaknaan dari keterkaitan antara dimasa yang akan datang serta keterkaitan atau interaksi antar sebuah perekonomian dan sumber daya alam dan lingkungan. Pada hakekatnya tujuan dari pembangunan merupakan suatu peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya didalamnya. Sedangkan tujuan pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan yang memenuhi kesejahteraan suatu masyarakat tanpa harus memangkas kesempatan di era kedepan guna juga untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang.

Konsep pembangunan berkelanjutan, tabrakan kebijakan dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumber daya alam untuk memerangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah degradasi lingkungan perlu di hindari serta sejauh mungkin

dapat berjalan secara berimbang (Sutamihardja, 2004). Pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan tentu perlu sebuah pertimbangan dalam pemenuhan kebutuhan yang tidak berlebih atau wajar, dan mendistribusikan secara luas serta menjunjung nilai untuk melahirkan standar konsumsi yang berbeda dalam batas kemampuan suatu lingkungan. Dengan kata lain pemanfaatan sumber daya yang telah ada dapat meraih tingkat efisien dan efektivitas yang tinggi, guna keberlanjutan kehidupan kedepan. Pembangunan berkelanjutan memberi syarat pertumbuhan ekonomi ditempat yang kebutuhan utamanya belum konsisten pada pertumbuhan ekonomi, asalkan pertumbuhan mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan (Rahadian, 2016). Maka dari sini perlu adanya suatu tindakan atau peran pemerintah dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan pemerintah membutuhkan strategi kebijakan dalam pelaksanaan juga perlu adanya pengendalian yang cocok.

Pemerintah merupakan penggerak utama dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi/review SDGs. Tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan adalah tujuan akhir pembangunan dalam kesejahteraan program SDGs Desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, layanan dasar serta akses sumber daya produktif harus menjadi prioritas utama dalam keseharian. Penyediaan pangan melalui ketahanan pangan serta pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menyediakan pangan (Murniningtyas & Alisjahbana, 2018).

Peran serta tanggungjawab besar yang diterimadesa dalam program SDGs maka pemerintah desa harus memiliki prinsip akuntabilitas dalam perencanaan

pelaksanaan tata usaha pelaporan pertanggungjawaban baik kepada negara ataupun masyarakat sesuai dengan ketentuan.

Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang tidak luput dari persoalan kemiskinan di Indonesia. Dengan jumlah kabupaten dan kota yang banyak, maka persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh Sulawesi Selatan tidak bisa dianggap sepele. Desa Bonto Salluang yang terletak di Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu wilayah yang berada dalam naungan Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Bonto Salluang merupakan desa dengan pendapatan dana desa yang hampir setiap tahun mengalami peningkatan. Desa Bonto Salluang dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan kelaparan ada 3 indikator sasaran utama. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian indikator utama. Sasaran peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan mulai tahun 2015 sampai dengan 2022. Data dari BPS jumlahnya meningkat, dengan seperti ini akan meluapnya Desa Bonto Salluang dengan disesaki jumlah penduduk. Dengan jumlah masyarakat yang tinggi di Desa Bonto Salluang ini maka tidak dipungkiri juga terdapat juga jumlah keluarga miskin. Pada tahun 2022 Desa Bonto Salluang mempunyai jumlah Penduduk 2.497 jiwa, terdiri dari 608 kepala keluarga. Dari 608 kepala keluarga penduduk Desa Bonto Salluang, 128 diantaranya termasuk dalam kategori masyarakat miskin.

Berdasarkan pra penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa pada dasarnya masyarakat Desa Bonto Salluang masih banyak yang tergolong miskin. Dari hasil pendataan ternyata persentase masyarakat miskin mencapai 16,54% atau (RPJMDesa, 2019). Menurut RPJMD (Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah) 2016-2021 bahwa angka kemiskinan dapat ditekan semaksimal mungkin. Pemerintah Desa Bonto Salluang setiap tahun berhasil menekan angka kemiskinan secara signifikan selama lima tahun terakhir. Penurunan pada angka kemiskinan tahun 2021 12,48% dari semula tahun 2020 16,54% menjadi 14,06% tahun 2021. Jumlah kepala keluarga Desa Bonto Salluang sebanyak 608 kepala keluarga, 14,06% atau sekitar 43 kepala keluarga diantaranya merupakan kategori miskin.

Untuk menanggulangi kemiskinan pemerintah Desa Bonto Salluang berupaya keras untuk memberdayakan masyarakat dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang terukur berbasis skil, memberikan lapangan kerja pada Padat Karya Tunai Desa yaitu pembangunan desa, memaksimalkan bantuan dari BLT, bantuan Kementerian Sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan dari Kementerian Sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan yang bersifat tidak mengikat dari Rumah Zakat untuk didistribusikan kepada masyarakat sesuai kriteria.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana evaluasi pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam upaya menghapus kemiskinan/menanggulangi di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng?

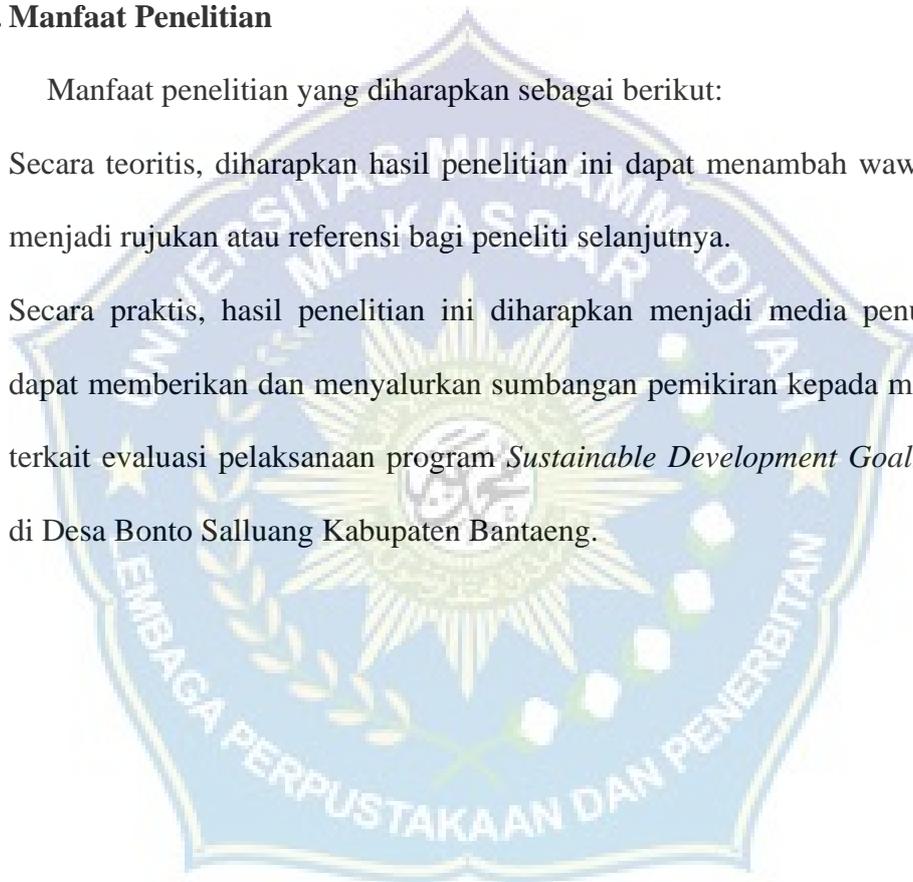
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam upaya menghapus/menanggulangi kemiskinan di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi media penulis yang dapat memberikan dan menyalurkan sumbangan pemikiran kepada masyarakat terkait evaluasi pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng.



BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian, sehingga penelitian dapat memperkaya teori yang digunakan. Berdasarkan hasil penelusuran berbagai penelitian maupun literatur kepustakaan yang pernah dilakukan sebelumnya, peneliti tidak menemukan pembahasan yang memiliki objek kajian serupa dengan penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti mencantumkan hasil penelitian yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Adapun hasil penelusuran beberapa literatur kepustakaan yang dimaksud, antara lain:

Nama/ Tahun	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
Putra, D.A., Rusmanja ya, R., Rusydany, M.H.,&Wi bawani, S (2020)	Evaluasi Program Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda Menuju Sustainable Development Goals di Kota Surabaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan dari program Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda memiliki beberapa tahapan dan sesuai dengan standar operasional Prosedur, demi mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian parapenyelenggara PE &	Penelitian ini terkait Sustainable Development Goals (Sgds)	Lokasi penelitian, Fokus penelitian, Indikator yang diteliti.

		<p>PM serta juga mencapai tingkat efisien dan efektivitas tanggung jawab individu serta peserta secara menyeluruh. Diawali dengan target capaian SDGs sesuai dengan penetapan yang dilaksanakan di gedung PBB dengan perwakilan tiap pemimpin negara yang tergabung dan dilanjutkan penurunan tugas terhadap tiap daerah dengan kepercayaan bahwasannya pemimpin tiap daerah bisa memberikan suatu program yang dapat menyelesaikan target.</p>		
Ruslan, D., (2019)	<p>Evaluasi Millenium Development Goals (Mgds) Dalam Menanggulangi Kemiskinan</p>	<p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kondisi capaian pembangunan di Kota Medan melalui indikator <i>Millienium Development Goals</i> (MDGs) pada dasarnya sudah berjalan</p>	<p>Penelitian ini terkait Sustainable Development Goals (Sgds)</p>	<p>Lokasi penelitian, Fokus penelitian, Indikator yang diteliti.</p>

	<p>dan Kelaparan Menuju Sustainable Development Goals (SDGs) di Kota Medan</p>	<p>dengan baik dimana dari 7 indikator yang dicanangkan sebagai besar kegiatan sudah tercapai, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan pada umumnya sudah tercapai yaitu terkait dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, Laju PDRB per tenaga kerja, Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas, Prevalensi Balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi, Prevalensi balita gizi buruk, Prevalensi balita gizi kurang kecuali untuk tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total</p>		
--	--	---	--	--

		kesempatan kerja belum tercapai.		
--	--	----------------------------------	--	--

Sumber: Hasil kajian penulis, 2022.

Secara umum perbedaan secara umum penelitian saya dan penelitian sebelumnya adalah dilihat dari segi fokus dan lokasi, metode dan pendekatan penelitian dari penelitian, teori dan indikator yang digunakan sehingga sangatlah berbeda apa yang menjadi penelitian yang dilakukan dari beberapa penelitian sebelumnya, dilihat dari segi tempat penelitian dan perilaku yang akan diteliti.

B. Teoridan Konsep

1. Konsep Evaluasi

a. Pengertian Evaluasi

Evaluasi sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan kehidupan manusia sehari-hari, karena disadari atau tidak, sebenarnya evaluasi sudah sering dilakukan, baik untuk diri sendiri maupun kegiatan sosial lainnya. Hal ini dapat dilihat mulai dari berpakaian, setelah berpakaian ia berdiri dihadapan kaca apakah penampilannya wajar atau belum.

Menurut Arifin & Zainal (2010), mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi (Arifin, Z, 2010)

Dalam ekonomi Islam evaluasi merupakan salah satu komponen dari sistem yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan Islam dan proses pembelajaran. Dengan demikian evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan incidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan berdasarkan atas tujuan yang jelas (Ramayulis, 2010)

Evaluasi adalah suatu proses menentukan nilai seseorang dengan menggunakan patokan-patokan tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, evaluasi proses produksi adalah suatu proses menentukan nilai proses produksi dengan menggunakan patokan-patokan tertentu agar mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan sebelumnya (Siregar, E.&Nara, H., 2011).

Evaluasi dapat digunakan untuk menyusun gradasi kemampuan karyawan, sehingga ada penanda simbolik yang dilaporkan kepada semua pihak. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif, obyektif, kooperatif, dan efektif dan berpedoman pada tujuan (Soetopo, H. 2005)

b. Jenis Evaluasi

Menurut PP No. 39 Tahun 2006, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Metode evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi lima yaitu :

1. *Before and after comparisons*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya.
2. *Actual versus planned performance comparisons*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (*actual*) dengan ketetapan perencanaan yang ada (*planned*).
3. *Experintal (controlled) model*, metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang diteliti.
4. *Quasi experimental models*, merupakan metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.
5. *Cost oriented models*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian yang hanya berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana.

c. Indikator Evaluasi

William N. Dunn (2003) menggambarkan 6 tipe evaluasi antara lain:

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Pemerataan/ kesamaan
5. Responsivitas
6. Ketetapan

2. Konsep *Sustainable Development Goals (SDGs)*

a. Pengertian *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. *SDGs* adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. *Sustainable Development Goals (SDGs)* ini diresmikan pada tanggal 25 September 2015 menggantikan program sebelumnya yaitu *Millennium Development Goals (MDGs)* sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)*. *Sustainable Development Goals (SDGs)* menjadi kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang sebelumnya menggunakan konsep *Millennium Development Goals (MGDs)* sekarang diganti dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Berbeda dari pendahulunya *Millennium Development Goals (MDGs)*, *SDGs* dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, *Civil Society Organization (CSO)*, sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target *SDGs*. *SDGs* mengusung tema “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”,

Sustainable Development Goals (SDGs) yang berisi 17 Tujuan dan 169 target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) adalah pembangunan yang memasukkan unsur lingkungan hidup dan suatu bentuk pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang dengan tetap memperhatikan dan mempersiapkan kebutuhan masa yang akan datang. Hal yang hendak dicapai dari pembangunan berkelanjutan ini adalah bahwasanya terdapat pemerataan pembangunan antara generasi masa sekarang dan masa yang akan datang (Rahadian, 2016).

Menurut Budihardjo (Muthmainnah, Mustansyir, & Tjahyadi, 2020) pada dasarnya *Sustainable development* merupakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai suatu proses perubahan dimana pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pembangunan dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kinimaupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengurangi hak pemenuhan kebutuhan pada generasi mendatang. Menurut United Nations Development Programme (UNDP) tujuan pembangunan sendiri yaitu untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati kehidupan dengan usia yang panjang, sehat, kreatif dan sejahtera. Pada hakekatnya pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk memperoleh pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang (Trifita, A., & Amaliyah, R., 2020).

b. Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (Patiung, M., 2017).

SDGs (*Sustainable Development Goals*) mempunyai 17 tujuan dengan 169 target, dimana tujuan dan target-target dari SDG ini bersifat global serta dapat diaplikasikan secara universal yang dipertimbangkan dengan

berbagai realitas nasional, kapasitas serta tingkat pembangunan yang berbeda dan menghormati kebijakan serta prioritas nasional.

Tujuan dan target *SDGs (Sustainable Development Goals)* tidaklah berdiri sendiri, perlu adanya implementasi yang dilakukan secara terpadu. Menurut Kementerian Kesehatan (Bakril, B., 2017). Tujuan dari *Sustainable Development Goals (SDGs)*, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan.
- 3) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
- 4) Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
- 5) Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
- 6) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
- 7) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
- 8) Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.

- 9) Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
- 10) Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
- 11) Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
- 12) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
- 13) Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
- 14) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- 15) Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
- 16) Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
- 17) Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

Gambar 2.1 Simbol 17 Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)



Sumber: <https://www.sdg2030indonesia.org>

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan

Tujuan ke-1 memiliki 7 target yang ingin dicapai secara global.

Inti dari target tersebut adalah untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun.

Tanpa kemiskinan atau *No Poverty* adalah tujuan pertama dalam program SDGs. Salah satu targetnya adalah untuk menghapus kemiskinan ekstrim, yaitu penduduk dengan daya beli kurang dari Rp 7.800 per hari, mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin (laki-laki, perempuan dan anak dari segala usia) berdasarkan definisi nasional, dan memastikan semua penduduk, terutama penduduk miskin dan rentan mendapat hak setara mengakses sumber ekonomi (seperti halnya hak layanan dasar), kepemilikan dan akses pada lahan. Memastikan mereka memperoleh akses teknologi. Berdasarkan lembar

fakta SDGs Indonesia, masih ada 22,76 % penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional dengan tiga provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu NTT, Papua dan Papua Barat.

2. Tanpa Kelaparan

Tujuan ke-2 memiliki 8 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

Mengakhiri kelaparan atau *zero hunger* adalah upaya untuk mengatasi masalah kelaparan atau kekurangan pangan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Menggandakan produktivitas agrikultur dan ketahanan pangan adalah agenda utama PBB dalam rangka mengakhiri kelaparan dan memperbaiki nutrisi masyarakat.

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan ke-3 memiliki 13 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

Kehidupan sehat dan sejahtera (*Good Health and Well-Being*) adalah tujuan SDGs untuk mengkampanyekan gaya hidup sehat dan berupaya untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat dunia. Pada tahun 2030, PBB menargetkan seluruh masyarakat mampu memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia menunjukkan kondisi yang semakin baik yaitu pada periode

1991- 2015 Angka Kematian Ibu (AKI) menurun dari 390 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup dan pada periode yang sama, Angka Kematian Bayi (AKB) juga mengalami penurunan dari 68 per 1000 kelahiran hidup menjadi 23 per 1000 kelahiran hidup.

4. Pendidikan Berkualitas

Tujuan ke-4 memiliki 10 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Pendidikan yang berkualitas adalah salah satu tujuan SDGs untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Program ini memastikan semua manusia bisa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh dunia.

5. Kesetaraan Gender

Tujuan ke-5 memiliki 9 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Gender equality adalah salah satu permasalahan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia. Program ini berusaha mencegah diskriminasi terhadap gender tertentu dan memastikan semua gender mendapatkan kesempatan yang sama tanpa mengalami diskriminasi.

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan ke-6 memiliki 8 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Clean water and sanitation atau air bersih dan sanitasi layak adalah upaya untuk memastikan setiap orang untuk bisa mendapatkan air bersih dan sanitasi yang layak. Pada tahun 2030, PBB menargetkan seluruh manusia untuk memiliki akses air minum yang aman dan terjangkau serta mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, sekitar 70,97% rumah tangga di Indonesia pada tahun 2015 telah memiliki akses air minum yang layak namun baru ada sekitar 62,14% rumah tangga di Indonesia yang memiliki sanitasi layak.

7. Energi Bersih dan Terjangkau

Tujuan ke-7 memiliki 5 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Di beberapa tempat, masyarakat masih terisolasi dan belum memiliki listrik sehingga kehidupan mereka sangat terbatas. Oleh karena itu, PBB mencoba untuk memastikan setiap untuk mendapatkan energi yang bersih serta terjangkau atau *affordable and clean energy*.

8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan ke-8 memiliki 12 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (*decent work and economic growth*) adalah tujuan ke-8 dalam program SDGs yang dicanangkan PBB. Mereka berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh negara sehingga bisa menjamin setiap orang mendapatkan pekerjaan yang layak.

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Tujuan ke-9 memiliki 8 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

Industri, inovasi, dan infrastruktur adalah upaya untuk membangun infrastruktur yang baik, mendukung industrialisasi yang inklusif, serta membantu perkembangan inovasi. Hal ini adalah salah satu cara untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dunia.

10. Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan ke-10 memiliki 10 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Kesenjangan sosial dan ekonomi adalah salah satu masalah yang serius dan harus segera ditangani. Program ini berusaha

mengurangi kesenjangan kehidupan di negara maju dan negara berkembang.

11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Tujuan ke-11 memiliki 10 target yang ingin dicapai secara global.

Inti dari target tersebut adalah menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

PBB menargetkan pada tahun 2030, masyarakat bisa memiliki akses terhadap perumahan, transportasi, dan pelayanan dasar yang layak serta terjangkau.

12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Tujuan ke-12 memiliki 11 target yang ingin dicapai secara global.

Inti dari target tersebut adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang dilakukan menggunakan cara-cara yang berkelanjutan.

13. Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan ke-13 memiliki 5 target yang ingin dicapai secara global.

Inti dari target tersebut adalah untuk mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Perubahan iklim adalah masalah yang serius dan bisa menimbulkan berbagai permasalahan seperti bencana. Program SDGs adalah salah satu langkah untuk melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim untuk mencegah hal-hal buruk terjadi. Oleh karena itu untuk mengurangi bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim, 33 dari 34 provinsi

telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

14. Ekosistem Lautan

Tujuan ke-14 memiliki 10 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

Menjaga ekosistem laut atau *life below water* adalah upaya untuk melestarikan kehidupan makhluk-makhluk yang tinggal di laut. Tindakan seperti perburuan ilegal dan pencemaran laut terus dikurangi untuk menjaga kehidupan di laut.

15. Ekosistem Daratan

Tujuan ke-15 memiliki 12 Target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk melindungi, merotasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari dan berkelanjutan, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan ke-16 memiliki 12 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah upaya untuk mendorong kehidupan masyarakat yang damai, adil, dan institusi yang inklusif. Tujuan ini dilakukan dengan mendukung masyarakat yang damai dan inklusif

untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

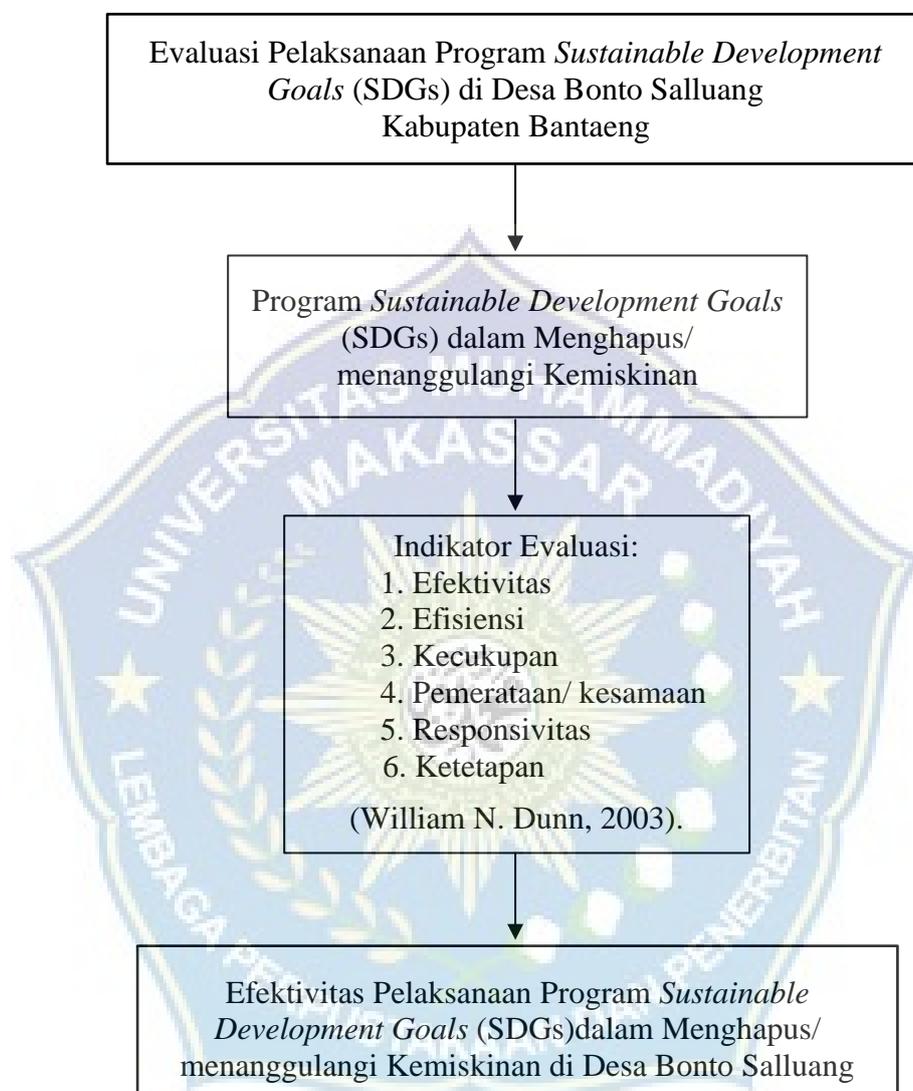
Tujuan ke-17 memiliki 19 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Menciptakan kehidupan yang lebih baik tentu membutuhkan andil dari semua pihak. Kemitraan untuk mencapai tujuan adalah upaya untuk menyatukan berbagai pihak untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan.

C. Kerangka Pikir

Evaluasi bertujuan menilai suatu aktivitas secara spontan dan incidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan berdasarkan atas tujuan yang jelas (Ramayulis, 2010).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori William N. Dunn (2003) terkait indikator evaluasi, yaitu: efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan/kesamaan, responsivitas, dan ketetapan. Keenam indikator inilah yang akan digunakan peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengkaji terkait Evaluasi Pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa BontoSalluang Kabupaten Bantaeng. Pada penelitian ini, peneliti fokus pada tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam menghapus kemiskinan di Desa BontoSalluang Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang dan kajian pustaka diatas, maka disusunlah kerangka konseptual seperti sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah Evaluasi Pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam upaya menghapus/menanggulangi kemiskinan di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng berdasarkan pada

indikator evaluasi, yaitu: efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan/kesamaan, responsivitas, dan ketetapan.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Efektivitas, yaitu tercapainya keberhasilan dalam upaya menghapus kemiskinan pada pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng.
2. Efisiensi, yaitu usaha untuk mencapai tujuan yang maksimal sehingga menghasilkan tingkat efektivitas tertentu pada pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng dengan meminimalisir pengeluaran sumber daya seperti biaya, waktu, dan usaha atau tenaga.
3. Kecukupan, yaitu tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan dalam berbagai hal. Mengukur seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng.
4. Pemerataan/kesamaan, yaitu manfaat program *Sustainable Development Goals* (SDGs) diperoleh secara merata oleh masyarakat di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng.
5. Responsivitas, yaitu tingkat kepuasan, umpan balik, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu terhadap pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng.

6. Ketepatan, yaitu nilai atau harga dari tujuan pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng dan asumsi yang melandasi tujuan tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, dalam penelitian ini berlokasi di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng. Alasan saya memilih lokasi penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program SDGs di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan setelah seminar proposal dilaksanakan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2016) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskriptif, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Sementara metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran dan narasi secara jelas mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan apa yang dilakukan atau dialami peneliti. Masalah yang akan diteliti terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Program SDGs di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng.

C. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari atas:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan yang mengetahui dan berkompeten dengan pelaksanaan penelitian ini terkait Evaluasi Pelaksanaan Program SDGs di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi, catatan-catatan, serta dokumentasi lain yang berfungsi sebagai data penunjang dan pelengkap informasi yang dibutuhkan terkait Evaluasi Pelaksanaan Program SDGs di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini dipilih beberapa orang sebagai informan

utama yang berperan penting terkait Evaluasi Pelaksanaan Program SDGs di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jabatan
1	Kepala Desa Bonto Salluang	Kepala Desa Bonto Salluang
3	Erwin HB, S.Si	Kasi Kesejahteraan
3	Irman	BPD Desa Bonto Salluang
4	Nasrun	Kepala Dusun Paccikokang
5	Andi Indah	Masyarakat/Pelaku UMKM

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, metode pengumpulan data yang penulis tempuh adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Metode penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian untuk mendapatkan data atau yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode penelitian yang dilakukan oleh penulis langsung dengan mengadakan tanya jawab secara lisan kepada informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh laporan dan dokumen lainnya yang erat hubungannya dengan objek penelitian dan membaca literatur sebagai dasar teori yang akan dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penulisan skripsi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan. Adapun langkah-langkah dengan prosedur tahapan-tahapan berikut (Sugiyono, 2017):

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan langkah yang dilakukan dengan memilih data dan fokus kepada data yang memang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan data yang sifatnya sebagai pelengkap saja.

2. Penyajian data

Dari data yang diperoleh dari lapangan kemudian antara mana yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan kemudian melakukan pengelompokan dan diberikan batasan masalah.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data maka dilakukan kesimpulan awal. Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah penelitian. Pada proses pengumpulan data peneliti berusaha melakukan analisis dan makna terhadap data yang sudah dikumpulkan.

G. Pengabsahan Data

Studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif mengajukan empat kriteria keabsahan dan kejegan yang diperlukan dalam suatu

penelitian pendekatan kualitatif. Pada tahap ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi menurut Sugiyono (2012) antara lain:

a) Triangulasi data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

b) Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlawanan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada tinjauan teoretis untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

c) Triangulasi metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bonto Salluang

1. Sejarah Desa Bonto Salluang

Nama Desa Bonto Salluang diberikan masyarakat pada saat terjadi pemekaran desa dari induk kelurahan Bonto Lebang ke Defenitif Desa Bonto Salluang. Bonto Salluang terdiri dari dua suku kata Yaitu Bonto dan Salluang. Kata Bonto adalah kata yang bermakna bukit dimana didaerah pemerintahan wilayah Kecamatan Bissappu mayoritas wilayah perbukitan sedangkan Salluang berarti Nipasallu karena pada masa lalu di daerah ini sering diadakan penghukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran adat dan norma masyarakat, penghukuman ini dilakukan dengan cara “Nipasallu” artinya diceburkan ke kedalaman air.

Desa Bonto Salluang pada masa silang merupakan bagian dari Kelurahan Bonto Lebang yang terdiri dari beberapa kampung, yaitu Kampung Paccikkokang, Borongkalukua, Kampung Pandarengan, Kampung Puncukku, Kampung Talaka, dan Bissappu serta pattirotiroeng yang dipimpin oleh seorang kepala Kepala lingkungan (BapakMuzakkir Abunawas) sekitar tahun 1995-1996. Lalu pada tahun 1997masuk pada masa desa Persiapan dan pada akhirnya defenitif menjadi desa Bonto Salluang pada tahun 1998.

Adapun pelaksanaan estapet Desa Bonto Salluang sejak awal terbentuknya sampai saat ini adalah:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) Harling Tutu, Bsc | : Tahun 1998-2000 |
| 2) Harling Tutu, Bsc (dua periode) | : Tahun 2001-2011 |
| 3) Awaluddin, SE | : Tahun 2012-2017 |
| 4) Habibi | : Tahun 2018-2023 |

2. Letak Geografis dan Luas Wilayah Desa Bonto Salluang

Desa Bonto Salluang terletak diwilayah pemerintahan Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, Jarak dari Ibu kota Kecamatan \pm 7 Km dan jarak dari Ibukota kabupaten \pm 12 Km. Jika menggunakan kendaraan bermotor maka jarak tempuh kekota kecamatan \pm 30 menit, dan \pm 1 jam menuju Ibu kota kabupaten.

Desa Bonto Salluang memiliki kondisi daerah yang termasuk dalam kategori dataran Tinggi dengan yang memiliki luas \pm 361 Km². Dan merupakan wilayah pegunungan, Desa ini merupakan wilayah dataran Tinggi (daerah pegunungan). Kondisi tanah cukup subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman baik tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang. Batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Bonto Maccini Kecamatan Sinoa
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Bontolebang Kecamatan Bissappu
- c. Sebelah Timur : Kelurahan Bontolebang Kecamatan Bissappu
- d. Sebelah Barat : Desa Bonto Manai Kecamatan Bissappu

3. Administrasi Desa

Pusat pemerintahan Desa Bonto Salluang terletak di kampung Salluang dan secara administratif Desa Bonto Salluang terbagi atas delapan

kampung dari 4 dusun yaitu:

- a. Dusun Paccikkokang terdiri dari Kampung Paccikokang dan Batu Terang terdiri dari 4 RT dengan masing-masing RT dibagi menjadi 2 RK.
- b. Dusun Salluang terdiri dari Kampung Borongkalukua dan Paddaraengan, terdiri dari 4 RT dengan masing-masing RT dibagi menjadi 2 RK.
- c. Dusun Puncukku terdiri dari Kampung Puncukku dan Talaka, terdiri dari 4 RT dengan masing-masing RT dibagi menjadi 2 RK.
- d. Dusun Bissappu terdiri dari Kampung Bissappu dan Paranglabba, terdiri dari 4 RT dengan masing-masing RT dibagi menjadi 2 RK.

Setiap RT dipimpin oleh seorang Ketua RT yang dibantu oleh Ketua RK. Sistem pemerintahan Desa ini yakni, Camat sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat Desa dengan prosedur pertanggungjawaban disampaikan ke Bupati melalui Camat.

3. Topografi Desa

Desa Bonto Salluang memiliki kondisi daerah yang termasuk dalam kategori dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata mencapai 400-500 meter dari permukaan laut (dpl) dengan wilayah yang berbukit-bukit. Kondisi lahan yang terbanyak adalah sawah dan kondisi tanah yang cukup subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman baik tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang.

4. Iklim dan Curah Hujan

Iklim Desa Bonto Salluang, sebagaimana desa-desa lainnya di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau, penghujan dan pancaroba. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan keadaan masyarakat di Desa Bonto Salluang Kecamatan Bissappu. Musim hujan biasanya mulai pada bulan Januari sampai Maret, sedangkan musim pancaroba biasanya terjadi antara bulan April sampai Juni dan musim kemarau terjadi antara bulan Juli sampai September. Namun, ada kecenderungan curah hujan pada kondisi saat ini tidak menentu dan tidak jelas. Hujan biasa terjadi secara rutin bukan pada musim hujan malah terjadi pada musim kemarau begitupun sebaliknya.

5. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Desa Bonto Salluang mempunyai jumlah penduduk 2.229 jiwa (1.036 laki-laki dan 1.193 perempuan), terdiri dari 608 kepala keluarga. Penduduk ini tersebar dalam 4 wilayah dusun dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Bonto Salluang

Jenis Kelamin	Dusun Paccikkokang	Dusun Salluang	Dusun Puncukku	Dusun Bissappu	Total	Jumlah KK
Laki-laki	210	251	207	399	1.307	608
Perempuan	216	280	240	454	1.190	
Jumlah	436	531	447	853	2.497	

Sumber: Desa Bonto Salluang, 2023.

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Bonto Salluang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Desa Bonto Salluang

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	379
SMP	297
SMA	489
Diploma	17
S1	11
S2	2

Sumber: Desa Bonto Salluang, 2023.

c. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Bonto Salluang kebanyakan bekerja sebagai petani padi dan jangung, karena desa ini lebih dikenal sebagai desa penghasil padi dan jagung. Sebagian kecil bekerja sebagai peternak sapi, wiraswasta dan pegawai negeri.

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Desa Bonto Salluang

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	1.754
Pedagang	21
PNS	19
Veteran	2
Pegawai Swasta	315
TNI	5

Sumber: Desa Bonto Salluang, 2023.

6. Visi dan Misi Desa Bonto Salluang

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa, Penyusunan Visi Desa Bonto Salluang ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipasi, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa Bonto Salluang seperti pemerintah Desa, BPD, LPM, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Tokoh Pemuda, Lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah Pembangunan Kecamatan Bissappu, maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi desa Bonto Salluang adalah:

“Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Adil dengan Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Demokrasi dan Budaya Lokal Menuju Kemandirian Desa”.

Berdasarkan dengan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dimiliki desa Bonto Salluang. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka perlu adanya isu strategis sebagai penjabaran dari visi Pembangunan desa Bonto Salluang. Isu strategis dimaksud adalah:

- a. Mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas seluruh aparat pemerintah desa agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
- b. Mendorong masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di desa untuk pro aktif dalam melakukan monitoring terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan di desa.

- c. Mendorong dan memfasilitasi lembaga-lembaga yang ada di desa dalam peningkatan kapasitas pengurusnya dan pengalokasian biaya operasional kelembagaannya.
- d. Mengkoordinasikan kepada pengurus BPD untuk melahirkan peraturan desa tentang pelayanan publik.
- e. Mendorong dan memfasilitasi keaktifan kegiatan keagamaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal.
- f. Mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat serta penciptaan ruang-ruang yang besar dalam pelibatan masyarakat terhadap semua proses penyelenggara pembangunan desa yakni mulai dari proses perencanaan pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggung jawabannya/evaluasinya.
- g. Mendorong masyarakat dalam peningkatan etos kerja dengan melakukan penguatan kapasitas SDM dan pelatihan pengembangan keterampilan.
- h. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan usaha ekonomi produktif yang bertumpu pada bidang peternakan, perkebunan dan pertanian.

7. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa

Agenda Pokok berdasarkan isu strategis pembangunan Desa Bonto Salluang yang akan dihadapi pada 3 tahun kedepan, maka ditetapkan Enam agenda pokok pembangunan desa Bonto Salluang, yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan public guna terciptanya pemerintahan yang berkualitas.
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya pertanian, perkebunan, peternakan, dan wisata.
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha bersama yang dikelola oleh Lembaga ekonomi Desa (BUMDES dan LPM).
- d. Mendorong penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat.
- e. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal dan nonformal.
- f. Mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan.

8. Program Bantuan Di Desa Bonto Salluang

Berikut ini jumlah penerima bantuan dari pemerintah kategori BNPT, PKH dan bantuan modal di Desa Bonto Salluang tahun 2023:

Tabel 4.4 Daftar Penerima Program Bantuan di Desa Bonto Salluang

Program Bantuan	Jumlah
BNPT	124 orang
PKH	4 orang
Bantuan Modal	83 orang
Jumlah	211 orang

Sumber: Desa Bonto Salluang, 2023.

B. Hasil Penelitian

Evaluasi Pelaksanaan Program *SustainableDevelopment Goals* (SDGs) Di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng

Sebagai program SDGs Desa dalam pelaksanaannya yang menuju pada kesejahteraan masyarakat. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas program penggunaan Dana Desa Tahun 2021, terfokus 2 poin sasaran. Desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan yang diambil dari 18 tujuan dan sasaran pembangunan SDGs Desa. Dalam taat administrasi pengelolaan keuangan desa menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan pada tahun 2018 dengan Nomor 20.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. *SDGs* adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia danplanet bumi. *SDGs* ini diresmikan pada tanggal 25 September 2015 menggantikan perogram sebelumnya yaitu *MDGs* (*Millennium Development Goals*) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yangdisepakati oleh banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sustainable Development Goals (SDGs) bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, melawan ketimpangan, memastikan perlindungan

terhadap alam dan sumber daya yang terkandung didalamnya, dan menciptakan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

Upaya pencapaian target SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Fokus penelitian ini yaitu Evaluasi Pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng. Dalam melakukan evaluasi suatu program yang sudah dibentuk atau sudah berjalan maka diperlukan kriteria/indikator untuk mengukur keberhasilan program tersebut. Menurut Dunn, evaluasi program dapat dilihat keberhasilannya dengan menggunakan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan/kesamaan, responsivitas dan ketepatan, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

1. Efektivitas

Efektivitas menurut teori Dunn menyatakan efektivitas diukur apakah hasil yang diinginkan tercapai. Pencapaian tujuan berkaitan dengan kurun waktu dilaksanakannya kebijakan tersebut, dasar hukum dan sasaran program atau kebijakan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan public ternyata dampaknya tidak

mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi melalui proses tertentu. Hal ini dapat dilihat apakah program ini mencapai hasil yang di harapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Dalam penilaian mengenai efektivitas ditunjukkan untuk menjawab ketetapan waktu yang mencapai hasil atau tujuan untuk mengukur efektivitas program dengan menggunakan tolak ukur ketetapan waktu. Efektivitas berhubungan dengan alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakan kebijakan.

Berdasarkan pendapat diatas, maka apabila suatu tujuan mencapai target yang telah ditentukan atau yang telah disepakati maka efektivitasnya akan semakin besar. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa menjalankan suatu program tujuan awal harus benar-benar dirancang dengan sedetail mungkin sehingga mendapatkan hasil yang efektivitas yang besar. Tetapi

apabila setelah melaksanakan kegiatan program tidak mampu memecahkan masalah maka adanya kendala dalam menggagalkan program tersebut, tetapi adakalanya suatu program tidak langsung terlihat secara efektif dalam jangka pendek, akan tetapi terlihat dalam jangka waktu yang panjang dengan melakukan proses tertentu.

Program Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program prioritas penggunaan Dana Desa pada Tahun 2021 Sedangkan Dana Desa sudah diperjelas dalam Perpres yang dikeluarkan Presiden dengan Nomor 60 pada Tahun 2014. Yang isinya adalah dana yang ditransfer/bersumber dari APBNegara yang dimanfaatkan untuk desa. Dana tersebut ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Serta dimanfaatkan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa. Penyelenggaran pemerintah desa meliputi pada pembangunan, pembinaan atau pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu data yang penulis sajikan adalah data penggunaan Dana Desa pada program SDGs Desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Mengenai efektivitas program pelaksanaan program *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng guna tercapainya keberhasilan dalam upaya menghapus kemiskinan, pada dasarnya efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir

kebijakan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan Kepala DesaDesa Bonto Salluang terkait tingkat keberhasilan yang dicapai dalam upaya menghapus kemiskinan pada pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng:

“Kalau keberhasilan program SDGs di Desa Bonto Salaluang itu sudah 70% untuk data kemiskinan. Salah satunya yaitu kita adakan bantuan modal (tambahan) bagi pengusaha kecil seperti UMKM, selain dari Desa ada juga bantuan dari Dinas Sosial. Ada juga bantuan PKH dan BLT kepada masyarakat”.

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa keberhasilan program SDGs di Desa Bonto Salluang berada pada tingkat 70% dimana pemerintah desa fokus membangun desa dari kemiskinan melalui bantuan modal bagi masyarakat pelaku UMKM yang diberikan dari desa, serta ditunjang bantuan dari pemerintah pusat seperti PKH dan BLT bagi masyarakat kurang mampu. Instansi seperti Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng juga berperan memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha UMKM.

Kondisi masyarakat penerima bantuan baik bantuan modal, PKH maupun BLT di Desa Bonto Salluang sebelum dan saat ini mengalami perbedaan. Meskipun tidakmemiliki pekerjaan tetap, tidak berpenghasilan tinggi, dan terdata sebagai masyarakat miskin di desa, mereka masih bisa mencari pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk kelangsungan hidup dari hasil kerjanya sendiri.

Lebih lanjut informan ER selaku KesraDesa Bonto Salluang terkait apakah pelaksanaan program *Sustainable DevelopmentGoals* (SDGs) di

Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng dapat membantu menghapus atau mengurangi kemiskinan:

“Kalau disini, dengan adanya bantuan cukup membantu mengurangi data kemiskinan di Desa Bonto Salluang karena hasil yang kami peroleh itu mulai dari aspek kesehatan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat alhamdulillah telah baik dan berjalan lancar semua” (Wawancara dengan ER pada tanggal 12 Mei 2023).

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa salah satu tujuan pelaksanaan program SDGs di Desa Bonto Salluang mengurangi kemiskinan. Pada program SDGs terdapat 18 aspek yang harus dicapai namun ada tiga aspek utama yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan berkelanjutan terutama di Desa Bonto Salluang yakni aspek pembangunan, kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai wilayah pedesaan yang memiliki akses jauh dari pusat perkotaan dan pelayanan yang memadai, pemerintah desa perlu memperhatikan ketiga aspek tersebut. Perlunya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang memadai, pembangunan desa agar desa dan seluruh masyarakat semakin maju dan dapat bersaing dengan desa lain atau setara dengan perkotaan, serta pelayanan administrasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan.

Program SDGs Desa berbasis pembangunan yang berkelanjutan, masih tetap mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Karena ini sebagai dasar pengelolaan keuangan desa. Dalam pelaksanaan program SDGs Desa ini berbasis pembangunan yang berkelanjutan manfaatnya dapat dinikmati anak cucu, jadi tidak sekedar membangun namun harus dipikirkan dengan matang input output dan incomenya pembangunan. Untuk

pembangunan berkaitan erat dan tidak terlepas pada Dana Desa yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan pembangunan desa. Dalam perencanaan ini yang jelas hasil akhirnya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes).

Jadi bisa disimpulkan dari hasil wawancara di atas program *Sustainable Development Goals* (SDGs) sudah meringankan beban masyarakat Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng walaupun persentasenya masih dibawah 100% namun mampu memaksimalkan aspek-aspek yang dianggap perlu diprioritaskan dalam pembangunan desa berkesinambungan. Masyarakat Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng sangat terbantu untuk bertahan.

Maka dari itu program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng pada kriteria efektivitas dalam teori evaluasi milik Wiliam Dunn sudah mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah Desa Bonto Salluang dan masyarakat Desa Bonto Salluang terbukti membantu masyarakat berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Desa Bonto Salluang dan Kasi Kesejahteraan Bonto Salluang bahwa program *Sustainable Development Goals* (SDGs) sudah mencapai efektivitas.

2. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang maksimal sehingga menghasilkan tingkat efektivitas tertentu pada pelaksanaan suatu program dengan meminimalisir pengeluaran sumber

daya seperti biaya, waktu, dan usaha atau tenaga. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya perunit produk atau layanan. Dalam Efisiensi kebijakan dapat diukur dengan beberapa indikator dari segi biaya, dari segi waktu, dan segi tenaga.

Pada program *Sustainable Development Goals* (SDGs) usaha atau tindakan pemerintah desa agar mencapai tujuan adalah dengan mengalokasikan anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang kemudian disalurkan ke dana desa yaitu. Serta melakukan pendataan calon penerima bantuan modal bagi pelaku UMKM, untuk tahun ini ada 4 (empat) pelaku UMKM yang mendapat bantuan modal. Selain itu pemerintah desa melakukan pembangunan jalan tani untuk memudahkan akses para petani menuju lahan pertanian mereka dan perbaikan atau pelayanan permohonan fasilitas kesehatan yakni KIS kepada masyarakat kurang mampu. Fasilitas kesehatan ini dari pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Sosial, namun pemerintah desa yang melakukan pendataan terhadap masyarakat yang berhak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan/fasilitas kesehatan tersebut. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan Kepala Desa Bonto Salluang terkait bentuk usaha yang dilakukan pemerintah Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng pada pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) agar mencapai tujuan yang maksimal dan hasil yang efektif:

“Bentuk usahanya yaitu pemberian bantuan modal dari pemerintah dan instansi lain seperti Dinas Sosial dan bantuan PKH dan BLT dari pemerintah, pembangunan jalan tani, dan pelayanan pendataan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi syarat”.

Pelaksanaan program SDGs Desa terhadap kesejahteraan masyarakat ini lebih menekankan kepada aspek realiasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dalam pelaksanaan program SDGs Desa sangat erat hubungannya dalam pengelolaan keuangan desa. Dimana hal tersebut merupakan faktor paling utama dalam keberhasilan program SDGs Desa di Desa Bonto Salluang. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh IM selaku BPD Desa Bonto Salluang terkait kemampuan pemerintah desa mampu meminimalisir pengeluaran sumber daya (biaya, waktu dan usaha) dalam usaha mencapai tujuan yang maksimal pada pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs):

“Cukup meminimalisir karena kalau di Desa Bonto Salluang, kan disini ada dua jenis bantuan yakitu bantuan modal dan tambahan. Kalau bantuan modal kita bekerja sama dengan pengusaha kecil sehingga ada namaya PAD (Pendapatan Asli Desa), jadi dia kembalikan berapa dan kita bagi hasilnya. Kalau bantuan tambahan, langsung diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola sendiri. Kalau masalah waktu tidak terlalu memakan banyak waktu karena kita mengenal semua warga kita” (Wawancara dengan IM pada tanggal 12 Mei 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa program SDGs Desa mampu meminimalisir beban sumberdaya. Dalam pelaksanaanya tidak membutuhkan banyak waktu karena pemerintah desa memanfaatkan dari penggunaan dana desa demi kesejahteraan desa bebas dari kemiskinan

melalui pemberian bantuan modal usaha dan bantuan tambahan seperti PKH dan BLT dengan penggunaan waktu yang efisien atau tepat waktu.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya pemberian program *Sustainable Development Goals* (SDGs) sudah efisien dari segi pengeluaran sumber daya (biaya, waktu dan usaha) dalam usaha mencapai tujuan yang maksimal, penerima bantuan modal UMKM tepat sasaran karena merupakan data akurat dari desa dan bantuan tersebut digunakan untuk memperkuat usahanya. Sehingga dengan bantuan yang disalurkan tersebut tercapai efisiensi karena mampu menggunakannya dengan sebaik mungkin untuk tujuan mempertahankan usahanya. Dan dari segi waktu pendataan tidak membutuhkan waktu lama (tepat waktu) dikarenakan pemerintah desa mengenal kondisi setiap warganya, sehingga pemerintah Desa Bonto Salluang tidak terbebani perihal kebutuhan data yang efektif.

3. Kecukupan

Kecukupan adalah alat ukur seberapa jauh hasil dari kebijakan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi, atau dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi berbagai hal. Mengukur seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng. Dalam hal ini program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang Kabupaten

Bantaeng sudah cukup meringankan perekonomian masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Dusun Paccikokang Desa Bonto Salluang:

“Cukup memuaskan masyarakat meskipun bantuan modal yang kita berikan jumlahnya tidak seberapa namun mampu membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya. Begitu pula dengan bantuan PKH dan BLT, kalau inikan data penerimanya atau nama-nama penerima kita dapat dari Dinas Sosial jadi begitu bantuannya sampai kita langsung serahkan juga dan sangat membantu masyarakat, membantu mengurangi kemiskinan”(Wawancara dengan NS pada tanggal 12 Mei 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemberian bantuan modal dari pengelolaan keuangan desa dan berdasar pada prinsip atau arah pembangunan dan tujuan dari SDGs Desa. Program tersebut dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku serta akuntabel. Pada program tersebut dikelola untuk kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan. Pelaksanaan anggaran tersebut untuk kesejahteraan dan ketahanan pangan serta untuk peningkatan kapasitas masyarakat.

Adapun prioritas dari SDGs Desa adalah untuk pembangunan, kesehatan, serta pemberdayaan kearah desa tanpa kemiskinan serta desa tanpa kelaparan. Hal tersebut telah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh ER selaku Kasi Kesejahteraan mengenai apakah tujuan pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah dicapai:

“SDGs itu kan ada 18 program sasaran, untuk di Desa Bonto Salluang sendiri baru tercapai 3 tujuan/aspek, yakni pembangunan, kesehatan, dan aspek ekonomi. Kendalanya karena terkendala dana, dan belum memahami dengan jelas program SDGs, kurangnya arahan dari pihak pendamping terkait program SDGs. Apalagi sekarang program SDGs terpending, tidak kabar selanjutnya. Meskipun demikian hal ini tidak menghambat kita dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai terbukti

kita mampu mencapai 75% dari pelaksanaan program ini” (Wawancara dengan ER pada tanggal 12 Mei 2023).

Penyataan di atas menunjukkan bahwa program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang mampu mencapai tiga aspek penting dan proritas dalam membangun sebuah desa. Meskipun terkendala dana dan pemahaman mengenai program SDGs, namun pemerintah desa mengaku tidak mengurangi tingkat pencapaian dari tujuan yang ingin dicapai.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan, penulis menyimpulkan bahwa setelah berjalannya *Sustainable Development Goals* (SDGs) ini tentang menyelesaikan masalah perekonomian, pembangunan dan fasilitas kesehatan di Desa Bonto Salluang itu sendiri sangat efektif dalam membantu masyarakat, selama proses penyaluran bantuan modal, PKH maupun BLT masyarakat yang menerima program tersebut sangat terbantu, sehingga dengan adanya kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang sudah berjalan dengan baik sepenuhnya dan hasilnya memuaskan masyarakat yang menerima bantuan.

4. Pemerataan/ kesamaan

Indikator pemerataan ini erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil

didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pelayanan public yang adil dan merata. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat. Pemerataan disini adalah melihat bagaimana memanfaatkan distribusi yang diratakan kepada tiga kelompok yaitu kelompok pemerintah sebagai pembuat kebijakan, kelompok swasta sebagai objek kebijakan dan kelompok masyarakat sebagai dampak dari kebijakan.

Pemerataan/kesamaan dalam penelitian ini yaitu manfaat program *Sustainable Development Goals* (SDGs) diperoleh secara merata oleh masyarakat di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng. Dalam kebijakan publik dapat dikatakan keadilan yang merata dan diperoleh oleh sasaran kebijakan, dalam proses pemerataan kebijakan program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Seperti yang dikatakan oleh ER selaku Kasi Kesejahteraan Desa Bonto Salluang melalui wawancara terkait manfaat program *Sustainable Development Goals* (SDGs) diperoleh secara merata oleh masyarakat di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng?

“Kalau yang merata itu tambahan bantuan modal, PKH, BLT. Semuanya sesuai kriteria. Pembangunan juga merata karena dari segi perbaikan jalan” (Wawancara dengan ER pada tanggal 12 Mei 2023).

Penyataan di atas menunjukkan bahwa manfaat dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Desa Bonto Salluang. Manfaat dirasakan dalam bentuk bantuan modal, PKH dan BLT. Dari semua penerima BLT Dana Desa, semuanya memenuhi

syarat dari kriteria. Perbaikan akses juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Desa Bonto Salluang melalui perbaikan jalanan pembangunan jalan tani. Dampak *Sustainable Development Goals* (SDGs) yakni semua pembangunan bisa dinikmati masyarakat desa, seperti pembangunan jalan usaha tani pembangunan irigasi untuk kesejahteraan masyarakat, pembuatan jembatan, pemeliharaan sarana prasarana. Bantuan langsung tunai untuk warga miskin. Pemberdayaan peningkatan kapasitas masyarakat untuk perekonomian maupun ketahanan pangan.

Sejalan pula dengan pernyataan AI salah satu pelaku UMKM di Desa Bonto Salluang bahwa:

“Menurut saya sudah merata, karena yang memiliki usaha dapat bantuan modal, yang kurang mampu dapat bantuan PKH atau BLT. Terutama perbaikan jalan dan pembangunan akses jalan tani cukup membantu semua petani disini” (Wawancara dengan AI pada tanggal 13 Mei 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang merata karena dari 3 jenis bantuan pemerintah desa mampu membagi kepada masyarakat sesuai dengan kriteria dan kebutuhan masyarakat desa. Terutama juga pada program pembangunan dan perbaikan jalan yang sangat membantu masyarakat sebagai masyarakat pedesaan yang identik dengan petani.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang sudah merata. Pemberian bantuan yang tepat sasaran dan sesuai

kriteria atau persyaratan, misalnya bantuan modal bagi pelaku UMKM yang memang sangat membutuhkan bantuan. Selain itu, penyaluran PKH dan BLT yang tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu.

5. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Dalam kebijakan public responsivitas diartikan respon dari suatu aktivitas yang berarti tanggapan sasaran publik atas penerapan suatu kebijakan. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Responsivitas pada penelitian itu yaitu tingkat kepuasan, umpan balik, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu terhadap pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng. Mengenai indikator responsivitas terhadap program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan IM selaku BPD Desa Bonto Salluang terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng:

“Salah satu pola pikir masyarakat itu kalau kita turun mendata , pikirnya pasti akan dapat bantuan. Jadi kalau selanjutnya tidak dapat bantuan, kami kemudian dikritik. Kalau masalah kepuasan masyarakat sesuai data SDGs masih kurang dilihat dari segi bantuan yang kurang

optimal atau jumlah bantuan yang diberikan dianggap kurang” (Wawancara dengan IM pada tanggal 12 Mei 2023).

Sejalan pula dengan pernyataan AI salah satu pelaku UMKM di Desa Bonto Salluang bahwa:

“Sebagai penerima bantuan modal UMKM sangat puas meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Saya berharap bantuan selanjutnya dengan nominal yang lebih dari sebelumnya” (Wawancara dengan AI pada tanggal 13 Mei 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang secara garis besar masyarakat puas dengan adanya program, namun tidak puas dengan jumlah bantuan yang diberikan dan selalu ingin diberikan bantuan. Dalam artian karena pola pikir dan pandangan masyarakat sehingga tidak puas dengan jumlah atau nominal bantuan yang diberikan.

Dari hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan dan masyarakat pelaku UMKM yang menerima disimpulkan bahwa program bantuan modal secara garis besar memuaskan masyarakat dengan adanya program SDGs karena program ini sangat membantu masyarakat Desa Bonto Salluang dengan respon yang baik dari masyarakat itu sendiri dan sangat membantu perekonomian. Namun, karena pola pikir dan pandangan masyarakat sehingga tidak puas dengan jumlah atau nominal bantuan yang diberikan.

6. Ketetapan

Ketepatan ini berkenaan dengan hasil dan tujuan yang diinginkan berguna bagi masyarakat. Dalam mengimplementasikan suatu program apakah akan memberikan nilai atau manfaat bagi masyarakat. Dengan kata

lain apakah program itu benar-benar berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Suatu kebijakan dapatnya diukur melalui alternatif yang digunakan dengan indikator ketepatan. Indikator ketepatan berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Mengenai indikator ketepatan pada program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng, peneliti telah mewawancarai ER selaku Kasi Kesejahteraan Desa Bonto Salluang terkait pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng telah sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai:

“Kalau sesuai tujuan SDGs untuk pembangunan Desa Berkelanjutan, maka program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang sesuai dengan SDGs, utamanya dibagian pembangunan sudah kita laksanakan semua sesuai sasaran di SDGs. Kemudian di aspek kesehatan dan ekonomi kita juga laksanakan dengan baik” (Wawancara dengan ER pada tanggal 12 Mei 2023).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam pembangunan Desa Berkelanjutan utamanya pada aspek pembangunan, ekonomi dan kesehatan

telah dilaksanakan sesuai sasaran dan ketentuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Lebih lanjut, terkait harapan dari pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang, ER mengatakan bahwa:

“Semoga SDGs selanjutnya dapat terlaksana dengan baik, karena di Desa Bonto Salluang baru sebagian terlaksana, mudah-mudahan nanti kita bisa capai 100%. Mudah-mudahan ada pergerakan lanjutan SDGs. Sampai sekarang tidak ada sosialisasi tentang SDGs” (Wawancara dengan ER pada tanggal 12 Mei 2023).

Pernyataan di atas diketahui bahwa pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang kurang sosialisasi tentang SDGs dari pihak pelaksana. Pemerintah Desa Bonto Salluang kedepannya dapat memenuhi semua aspek dan tujuan pada program SDGs.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam pembangunan Desa Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah dilaksanakan sesuai sasaran dan ketentuan dalam SDGs utamanya pada aspek pembangunan, ekonomi dan kesehatan. Pemerintah desa Desa Bonto Salluang berharap agar program ini berlanjut dan dilakukan sosialisasi yang lebih efektif terkait pelaksanaan program SDGs itu sendiri agar kedepannya Desa Bonto Salluang dapat mencapai 100%.

Setelah menguraikan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan maka peneliti akan menguraikan analisa sesuai rencana penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di

Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng. Sebagaimana dikemukakan oleh willam Dunn bahwa dalam menganalisa kebijakan menggunakan 6 kriteria evaluasi yaitu, efektivitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Tabel 4.5 Evaluasi berdasarkan beberapa indikator menurut Dunn (2003)

No	Indikator	Uraian
1	Efektivitas	Program <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Desa Bonto Salluang sudah mencapai efektivitas dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
2	Efisiensi	Program <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) sudah efisien dari segi pengeluaran sumber daya (biaya, waktu dan usaha) dalam usaha mencapai tujuan yang maksimal, penerima bantuan modal UMKM tepat sasaran karena merupakan data akurat dari desa dan bantuan tersebut digunakan untuk memperkuat usahanya.
3	Kecukupan	Program <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Desa Bonto Salluang itu cukup efektif dalam membantu masyarakat, masyarakat yang menerima program tersebut sangat terbantu, sehingga dengan adanya kebijakan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Desa Bonto

		Salluang sudah berjalan dengan baik sepenuhnya dan hasilnya memuaskan masyarakat yang menerima bantuan.
4	Pemerataan/ kesamaan	Program <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Desa Bonto Salluang sudah merata. Pemberian bantuan yang tepat sasaran dan sesuai kriteria atau persyaratan, misalnya bantuan modal bagi pelaku UMKM yang memang sangat membutuhkan bantuan.
5	Responsivitas	Program SDGs seperti bantuan modal secara garis besar memuaskan masyarakat dengan adanya program SDGs karena program ini sangat membantu perekonomian masyarakat Desa Bonto Salluang.
6	Ketepatan	Program <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Desa Bonto Salluang telah dilaksanakan sesuai sasaran dan ketentuan dalam SDGs utamanya pada aspek pembangunan, ekonomi dan kesehatan, sehingga program SDGs ini tepat dalam melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat desa.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa adanya program program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang ini yang tujuannya untuk pembangunan berkelanjutan mampu membantu masyarakat dari segi perekonomian sesuai dengan 6 indikator evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan/kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Peneliti menyimpulkan bahwa program-program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng sudah memenuhi indikator tersebut.

C. Pembahasan

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa adalah program pemerintah Indonesia yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa program SDGs Desa ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, perekonomian tumbuh secara merata dan terlibat aktif dalam pembangunan keberlanjutan.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 19 disebutkan bahwa SDGs Desa adalah:

“Upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa

berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”

Berdasarkan isi peraturan tersebut dapat diketahui bahwa program SDGs Desa adalah suatu upaya pemerintah Indonesia yang dibangun untuk mencapai kemakmuran Indonesia yang dimulai dari desa. Desa diberikan perhatian secara khusus, tidak hanya dalam persoalan ekonomi, tetapi juga kepedulian pada pendidikan, kesehatan, lingkungan, ramah perempuan, berjejaring dan tanggap budaya. Upaya-upaya dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan Indonesia secara berkelanjutan.

Selanjutnya, masih dalam peraturan yang sama, dalam upaya pembangunan desa secara berkelanjutan, program SDGs Desa juga menyangkut dengan Penggunaan Dana Desa. Dana Desa ini ditujukan sebagai wujud pemulihan ekonomi nasional.

Berikut ini hasil Evaluasi dari Pelaksanaan Program SDGs Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng.

1. Efektifitas

Efektifnya suatu program berjalan jika telah dilakukan pemantauan atau diuji dari hasil akhir program tersebut. Secara umum, yang dilihat adalah apakah suatu program diterima dan dipahami dengan baik oleh setiap objek yang disasar. Pada dasarnya, efektivitas melihat bagaimana pencapaian suatu program/organisasi/instansi dalam menjalankan pekerjaannya. Efektivitas ditinjau berdasarkan sumber dayanya, ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta proses dilakukannya suatu kegiatan.

Apabila pekerjaan atau kegiatan tersebut dilakukan dengan benar, maka hasil akhirnya pasti akan sangat memuaskan.

Terkait kategori untuk menilai efektif atau tidaknya suatu program, maka terdapat beberapa tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukurnya (Martani dan Lubis, 1987):

- a. Pendekatan Sumber, yaitu mengukur melalui sumber daya yang ada, baik secara fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan instansi.
- b. Pendekatan proses, yaitu dengan melihat pelaksanaan program, baik secara internal maupun eksternal.
- c. Pendekatan sasaran, yaitu melihat keberhasilan program berdasarkan hasil output.

Di balik beberapa tolak ukur di atas, terdapat 5 kriteria yang harus diperhatikan dalam pengukuran efektivitas (Tangkilisan, 2005), di antaranya:

1. Produktivitas
2. Kemampuan adaptasi kerja
3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan ber laba
5. Pencarian sumber daya alam

Dari keseluruhan tolak ukur dan kriteria di atas, peneliti melihat bahwa untuk menilai suatu program efektif atau tidak itu sangat tidak mudah. Namun, untuk menilai keefektifan suatu program juga dapat dilakukan

dengan cara melakukan wawancara. Berikut hasil wawancara yang telah peneliti simpulkan dari pemerintah desa di Desa Bonto Salluang. Secara umum peneliti melihat bahwa program SDGs Desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Bonto Salluang sudah dapat dikategorikan efektif. Hal ini dikarenakan mereka telah menerapkan SDGs Desa dengan sangat baik dan berorientasi pada pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat.

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Bonto Salluang adalah yang sejalan dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan kelaparan, seperti pemberian bantuan UMKM dan PKH serta perbaikan jalan tani. Oleh karena itu, program bantuan ini sebagai bagian dari SDGs Desa dilakukan secara merata dan serentak di seluruh desa di Indonesia, salah satunya juga dilaksanakan di desa Bonto Salluang.

Dengan adanya program seperti ini, memberikan dampak yang sangat signifikan pada kehidupan lingkungan desa. Masyarakat sangat dibantu dan diringankan bebannya dengan adanya subsidi dan program-program bantuan seperti ini. Sehingga, kondisi mereka berangsur membaik jauh dari kondisi mereka sebelumnya.

Di samping itu, program yang telah dijalankan juga telah melalui prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan adri hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dapat digaris bawahi bahwa pelaksanaan program SDGs Desa di Desa Bonto Salluang telah sangat efektif dilakukan.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya berupa dana, tenaga, atau waktu.

Program SDGs Desa di Desa Bonto Salluang mampu meminimalisir beban sumberdaya. Dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan banyak waktu karena pemerintah desa memanfaatkan dari penggunaan dana desa demi kesejahteraan desa bebas dari kemiskinan melalui pemberian bantuan modal usaha dan bantuan tambahan seperti PKH dan BLT dengan penggunaan waktu yang efisien atau tepat waktu.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa pada dasarnya pemberian program *Sustainable Development Goals* (SDGs) sudah efisien dari segi pengeluaran sumber daya (biaya, waktu dan usaha) dalam usaha mencapai tujuan yang maksimal, penerima bantuan modal UMKM tepat sasaran karena merupakan data akurat dari desa dan bantuan tersebut digunakan untuk memperkuat usahanya. Sehingga dengan bantuan yang disalurkan tersebut tercapai efisiensi karena mampu menggunakannya dengan sebaik mungkin untuk tujuan mempertahankan usahanya. Dan dari segi waktu pendataan tidak membutuhkan waktu lama (tepat waktu) dikarenakan pemerintah desa mengenal kondisi setiap warganya, sehingga pemerintah Desa Bonto Salluang tidak terbebani perihal kebutuhan data yang efektif.

3. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Indikator kecukupan bisa dilihat melalui ketepatan pelaksanaan program sesuai atau tidak dengan permasalahan yang sedang terjadi. Sebagai contoh, Desa Bonto Salluang adalah perwakilan dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Bantaeng yang membutuhkan bantuan untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk memberikan bantuan ke seluruh desa, termasuk kedua desa tersebut. Bantuan yang diberikan adalah melalui pelaksanaan program SDGs Desa. Bantuan ini salah satunya berupa pemberian bantuan UMKM. Dengan berlangsungnya program ini diharapkan dapat mengatasi kemiskinan dan kelaparan di Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan adalah sejauh ini penerapan dan pelaksanaan program SDGs Desa di Desa Bonto Salluang terbilang sangat tepat sasaran. Artinya, pemerintah desa memberikan program yang tepat untuk mengatasi kemiskinan di desa tersebut. Hal ini juga selaras dengan tujuan SDGs Desa nasional yaitu sebagai program yang fokus bergerak memajukan Indonesia dengan mengatasi kemiskinan di setiap daerah.

Sejauh ini, program SDGs Desa di Desa Bonto Salluang melalui aspek pembangunan, kesehatan dan ekonomi belum sepenuhnya dapat dikatakan telah memenuhi kebutuhan masyarakat, namun masyarakat merasa puas.

Pelaksanaan SDGs di Desa Bonto Salluang mampu mencapai 75% dari tujuan yang ingin dicapai. Meskipun, prosedur dan pelaksanaan program bantuan UMKM telah dilakukan, masyarakat merasa pemerintah desa perlu mengetahui dan mempelajari lebih lanjut terkait pihak-pihak yang layak mendapatkan bantuan tersebut.

Selain itu, bantuan yang telah diberikan dapat dikatakan telah meringankan beban setiap anggota masyarakat. Masyarakat mendapatkan pemenuhan dari segi pangan sembako dan dana bantuan. Masyarakat berharap agar proses pemberian bantuan dapat dilakukan secara adil dan merata.

4. Pemerataan/kesamaan

Pemerataan merupakan bahwa kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Indikator pemerataan artinya mencoba untuk melakukan transformasi atau mendistribusikan secara merata kepada objek yang disasar. Dalam hal ini biasanya kebijakan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keadilan dan kejujuran. Kebijakan ini biasanya ditemukan dalam bentuk pelayanan-pelayanan, seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan atau pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, indikator pemerataan juga menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan suatu program atau kegiatan.

Berdasarkan indikator pemerataan ini, peneliti telah menuangkan dalam pedoman wawancara yang peneliti lakukan di Desa Bonto Salluang. Peneliti ingin melihat sejauh mana keberhasilan SDGs Desa diterapkan pada desa tersebut. Apakah program SDGs Desa dilakukan dan disebarakan secara merata pada masyarakat desa atau sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti himpun dalam dapat diketahui bahwa pelaksanaan program SDGs Desa di Desa Bonto Salluang sudah dilakukan dengan baik. Artinya, pelaksanaan program SDGs Desa ini telah dilakukan secara merata kepada masyarakat di desa tersebut.

Dibalik meratanya pendistribusian program SDGs Desa di Desa Bonto Salluang, dikarenakan masyarakat telah diajak kerjasama untuk bermusyawarah terlebih dahulu agar pelaksanaan program SDGs Desa berjalan dengan lancar.

Di balik lancarnya program SDGs Desa di Desa Bonto Salluang seperti yang telah disampaikan oleh aparatur desa, masyarakat menilai bahwa tugas dan kinerja aparatur desa sudah baik dan merata. Masyarakat merasa pendistribusian bantuan seperti bantuan UMKM BLT, PKH dan Bansos serta perbaikan jalan tani sudah secara optimal dilakukan. Hal ini dikarenakan agar aparatur desa melakukan pemantauan terlebih dahulu kategori keluarga yang berhak menerima bantuan.

5. Responsivitas

Responsivitas merupakan yang berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-

kelompok masyarakat tertentu. Melalui indikator responsivitas ingin melihat bagai tanggapan dan respon pemerintah daerah dalam menanggapi kebutuhan masyarakat. Apakah sejauh ini program SDGs Desa sudah menjawab kegelisahan dan kebutuhan masyarakat di Desa Bonto Salluang. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, Hasil yang didapatkan adalah pemerintah desa di Desa Bonto Salluang telah sangat baik dalam merespon kebutuhan masyarakat di desa tersebut. Pemerintah desa berupa untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan dengan cara menerapkan program SDGs Desa di Bonto Salluang. Hal ini menjadi salah satu cara terbaik untuk merespon kebutuhan urgensi masyarakat.

Melalui respon yang tenggap ini, program SDGs Desa diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu masyarakat melawan kemiskinan dan kelaparan. Di samping itu, program SDGs Desa juga menjadi program pemerintah yang telah dilaksanakan untuk membantu masyarakat saat berada dalam masa sulit. Program SDGs Desa ini diharapkan menjadi salah satu program desa yang dapat dilakukan secara berkelanjutan ke depan nanti.

Selanjutnya, program SDGs Desa ini ternyata mendapatkan perhatian khusus dari dunia. Dalam Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development dijelaskan bahwa tujuan utama dari pembangunan desa adalah untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan di manapun lokasinya. Oleh karena itu, pemerintah

Indonesia mulai menaruh fokus penting memajukan Indonesia secara merata dimulai dari memajukan perkembangan desa.

Tidak hanya tanggap, berlangsungnya program SDGs Desa di Desa Bonto Salluang juga harus mengedepankan keadilan. Artinya, masih ada dari anggota masyarakat yang merasa bahwa program yang dijalankan aparat desa telah optimal tetapi belum merata dengan baik atau jumlahnya bantuan kurang. Masyarakat yang biasanya menerima bantuan lalu kemudian berikutnya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan mengkritik pemerintah. Hal ini perlu dilakukan kesepakatan terlebih dahulu kategori keluarga yang berhak menerima bantuan. Sehingga, tidak terjadinya kesalahpahaman di lingkungan desa di kemudian hari.

6. Ketetapan

Ketetapan merupakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah “kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Memutuskan suatu program atau kegiatan layak atau tidak adalah dengan cara melakukan evaluasi. Dalam penelitian ini peneliti menanyakan secara langsung kepada masyarakat di Desa Bonto Salluang terkait pelaksanaan program SDGs Desa.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti himpun dapat diketahui bahwa setiap narasumber yang peneliti wawancarai menunjukkan jawaban yang sama. Sejauh ini, masyarakat sudah dilibatkan dalam proses

pengenalan SDGs Desa. Masyarakat juga diajak untuk ikut berpartisipasi dalam proses pendistribusian bantuan UMKM, PKH dan Bansos. Tidak hanya itu, masyarakat juga dilibatkan di setiap acara/kegiatan/rapat yang dilakukan oleh aparat desa guna melaksanakan program SDGs Desa.

Jika dilihat dari respon kebanyakan masyarakat peneliti merasa ada hal yang perlu diperhatikan secara serius. Peneliti melihat bahwa belum adanya sinergitas dan keselerasan antara jawaban yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat. Secara umum mungkin program SDGs Desa sudah direalisasikan dan dari kedua pihak yaitu pemerintah desa di Desa Bonto Salluang dan masyarakat di desa tersebut mengakui bahwa program SDGs Desa telah dilaksanakan. Tetapi, dampak dari program SDGs Desa relative berbeda antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa mengatakan telah berupaya dengan baik dalam menjalan SDGs Desa dan telah melibatkan masyarakat. Sedangkan, dari kalangan masyarakat mengatakan bahwa belum merasa puas atas terlaksananya program SDGs Desa di Desa Bonto Salluang.

Melihat hasil evaluasi ini, peneliti menduga bahwa ada hal yang perlu ditinjau terkait pelaksanaan program SDGs Desa, baik dari segi pemerintah desa maupun dari segi masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat untuk memajukan bangsa Indonesai bebas dari kemiskinan.

BAB V

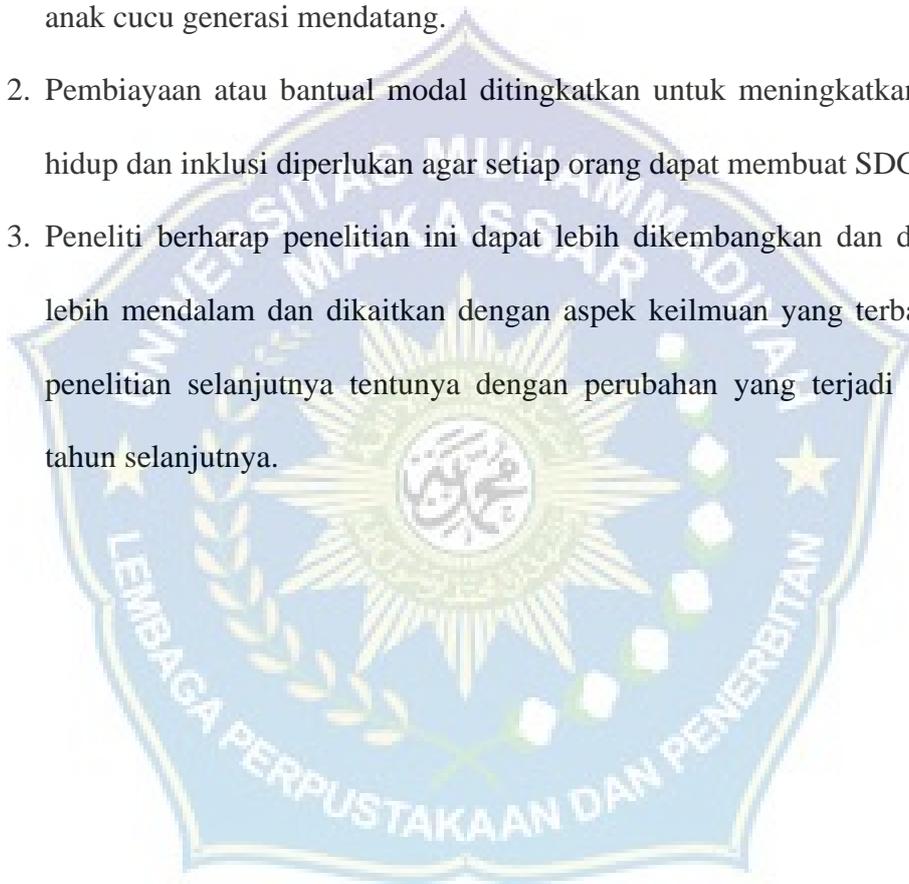
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait Evaluasi Pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng, maka dapat disimpulkan bahwa program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang ini yang tujuannya untuk pembangunan berkelanjutan mampu membantu masyarakat dari segi perekonomian sesuai dengan 6 indikator evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan/kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Program-program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng sudah memenuhi indikator tersebut. Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang sudah mencapai efektivitas dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Program SDGs seperti bantuan modal secara garis besar memuaskan dan yang menerima program tersebut sangat terbantu dengan adanya program SDGs karena program ini sangat membantu perekonomian masyarakat Desa Bonto Salluang. Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bonto Salluang telah dilaksanakan sesuai sasaran dan ketentuan dalam SDGs utamanya pada aspek pembangunan, ekonomi dan kesehatan, sehingga program SDGs ini tepat dalam melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat desa.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, saran dan bahan evaluasi dalam menentukan program-program kedepan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta program pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dinikmati oleh anak cucu generasi mendatang.
2. Pembiayaan atau bantuan modal ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan inklusi diperlukan agar setiap orang dapat membuat SDGs.
3. Peneliti berharap penelitian ini dapat lebih dikembangkan dan dikaji lagi lebih mendalam dan dikaitkan dengan aspek keilmuan yang terbaru untuk penelitian selanjutnya tentunya dengan perubahan yang terjadi di tahun-tahun selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggit, L. T. (2020). *Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pada Bidang Kesehatan (Studi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember)*. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Arifin, Z. (2010). *Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bakril, B. (2017). *Pengembangan Indikator, Tipologi, Dan Status Pembangunan Berkelanjutan Daerah Provinsi di Indonesia*. Institut Pertanian Bogor.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Handayani, D.M. (2019). *Analisis Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kediri*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Universitas Brawijaya Malang.
- Jusuf, G. (2017). *Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta Selatan: Sekretariat TPB Kementerian PPN/Bappenas.
- Martani, H & Lubis. (1987). *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia.
- Murniningtyas & Alisjahbana. (2018). *Latar Belakang Sejarah dan Proses Penyusunan SDGs. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi (p. 2)*. Bandung dan Purwokerto: Unpad Press.
- Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020). *Meninjau Ulang Sustainable Development: Kajian Filosofis atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Post Modern*. *Jurnal Filsafat*, 30(1), 23-45.
- Osborn, Cutter, & Ullah. (2015). *Universal Sustainable Development Goals. Report of a study : Stakeholder Forum*.
- Patiung, M. (2017). *Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal's Kota Kediri*. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 17(1).
- Putra, D.A., Rusmanjaya, R., Rusydany, M.H., & Wibawani, S. (2020). *Evaluasi Program Pahlawan Ekonomi Dan Pejuang Muda Menuju Sustainable Development Goals Di Kota Surabaya*. *Jurnal Syntax Transformation*. Vol. 1 No. 3.

- Rahadian, A. H. (2016). *Strategi Pembangunan Berkelanjutan*. In Prosiding Seminar STIAMI, 3(1), 46–56.
- Ramadhani. (2016). *Sustainable Development di Kota Surabaya dengan Program Surabaya Green and Clean (SGC)*. May.
- Ramayulis. (2010). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Ruslan, D.(2019). *Evaluasi Millenium Development Goals (MGDs) DALAM Menanggulangi Kemiskinan Dan Kelaparan Menuju Sustainable Development Goals (SGDs) Di Kota Medan*. *QE Journal*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.
- Santosa, D. (2019). *Administrasi publik: Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Siregar, E.&Nara, H. (2011). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soetopo, H. (2005). *Pendidikan dan Pembelajaran (Teori, Permasalahan dan Praktek)*. Malang: UMM Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metodelogi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutamihardja. (2004). *Perubahan Lingkungan Global: Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana*.
- Tangkilisan, Hessel N.S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Trifita, A., & Amaliyah, R. (2020). *Ruang Publik dan Kota Berkelanjutan: Strategi Pemerintah Kota Surabaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)*. *Global and Policy Journal of International Relations*, 8(2).
- Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- PP No. 39 Tahun 2006 tentang Evaluasi.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Lampiran

DOKUMENTASI PENELITIAN







**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/90/IPL/DPM-PTSP/IV/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: RIFALDI TRI AKBAR
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
N I M	: 105641104718
No. KTP	: 7303021004990002
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan	: Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	: Jl. Merpati Baru Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :
" **Evaluasi Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Salluang Kabupaten Bantaeng**"

Lokasi Penelitian	: Desa Salluang Kabupaten Bantaeng
Lama Penelitian	: 14 Maret 2023 s.d. 14 Mei 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat- istiadat Daerah setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantaeng;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



1202319009000090



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal : 04 April 2023
a.n. **BUPATI BANTAENG**
Dinas Penanaman Modal dan PTSP



YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.066972 Fax (0411)065500 Makassar 90221 e-mail dp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 821/05/C.4-VIII/III/1444/2023

17 Sya'ban 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

09 March 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0404/FSP/A.6-VIII/III/1444H/2023M tanggal 8 Maret 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RIFALDI TRI AKBAR

No. Stambuk : 10564 1104718

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Evaluasi Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Salluang Kabupaten Bantaeng"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 Maret 2023 s/d 14 Mei 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

BAB I rifaldi tri akbar 105641104718

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.unhas.ac.id
Internet Source

7%

2

Submitted to Sriwijaya University
Student Paper

2%



Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB II rifaldi tri akbar 105641104718

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pascasarjana.uad.ac.id Internet Source		6%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source		6%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper		2%
4	repository.uir.ac.id Internet Source		2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB III rifaldi tri akbar 105641104718

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	3%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	5%
2	repositori.unud.ac.id Internet Source	3%
3	issuu.com Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
 Exclude bibliography On

BAB IV rifaldi tri akbar 105641104718

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX	5% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source		4%
2	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source		2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



BAB V rifaldi tri akbar 105641104718

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uinjkt.ac.id
Internet Source

5%



Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



RIWAYAT HIDUP



Rifaldi Tri Akbar, lahir di Bantaeng pada tanggal 10 April 1999. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis menempuh jenjang Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2012 di SD Negeri 5 Lembang Cina Bantaeng. Kemudian pada tahun sama masuk ke SMP Negeri 2 Bantaeng dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama masuk di SMA SMA Negeri 4 Bantaeng dan tamat pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program Strata satu (S1). Pada tahun 2024, penulis menyelesaikan studi dengan karya ilmiah yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Di Desa Bonto Salluang Kabupaten Bantaeng”.